

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Kajian Teori

1. Kajian tentang Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

a. Pengertian Penelitian Tindakan Kelas

Penelitian Tindakan Kelas adalah suatu pendekatan untuk memperbaiki pendidikan melalui perubahan, dengan mendorong para guru untuk memikirkan praktik mengajarnya sendiri, agar kritis terhadap praktik tersebut dan agar mau untuk mengubahnya. PTK mendorong guru untuk berani bertindak dan berpikir kritis dalam mengembangkan teori dan rasional bagi mereka sendiri, dan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan tugasnya secara profesional (Hardjodipuro, 2014, h. 20).

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa PTK adalah guru siap untuk mengintrospeksi, atau mengevaluasi dirinya sendiri sehingga kemampuannya sebagai seorang guru yang profesional. Dan guru diharapkan juga dapat meningkatkan kemampuan diri tersebut dan dapat berpengaruh terhadap meningkatnya kemampuan belajar peserta didik, baik dalam aspek penalaran, keterampilan, pengetahuan hubungan sosial maupun aspek-aspek lain yang bermanfaat bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan PTK ialah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis reflektif terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh guru yang sekaligus sebagai peneliti, PTK yaitu meningkatkan kualitas pendidikan atau pengajaran yang dilaksanakan oleh guru / peneliti itu

sendiri, yang diharapkan dampaknya tidak ada lagi permasalahan yang mengganjal di dalam kelas pada saat proses pembelajaran.

b. Tujuan Penelitian Tindakan Kelas

Menurut John Elliot bahwa PTK bertujuan untuk mengkaji situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan kualitas tindakan di dalamnya (Elliot, 1982, h. 78).

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa tujuan PTK adalah dalam rangka guru bersedia untuk mengintrospeksi, bercermin, mereflekasi atau mengevaluasi dirinya sendiri sehingga kemampuannya sebagai seorang guru atau pengajar diharapkan cukup profesional.

Tujuan utama penelitian tindakan kelas adalah untuk mengubah perilaku pengajaran guru, perilaku peserta didik di kelas, peningkatan atau perbaikan praktik pembelajaran, dan atau mengubah kerangka kerja melaksanakan pembelajaran kelas yang diajar oleh guru tersebut sehingga terjadi peningkatan layanan profesional guru dalam menangani proses pembelajaran. Jadi PTK dimaksudkan untuk mengembangkan keterampilan atau pendekatan baru pembelajaran dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di ruang kelas. Sekaligus mengajak guru untuk menjadi seorang peneliti.

c. Karakteristik Penelitian Tindakan Kelas

Dilihat dari segi masalah yang harus dipecahkan, penelitian tindakan kelas memiliki karakteristik penting, yaitu masalah yang diangkat adalah masalah yang dihadapi oleh guru dikelas. PTK akan

dapat dilaksanakan jika pendidik sejak awal memang menyadari adanya persoalan yang terkait dengan proses dan produk pembelajaran yang dihadapi di kelas.

Karakteristik berikutnya dapat dilihat dari bentuk kegiatan penelitian itu sendiri. Penelitian tindakan kelas memiliki karakteristik yang khas, yaitu adanya tindakan (aksi) tertentu untuk memperbaiki proses belajar mengajar di kelas. Tanpa tindakan tertentu suatu penelitian juga dapat dilakukan di dalam kelas, yang kemudian sering disebut dengan *penelitian kelas*.

Karakteristik utama dalam penelitian tindakan kelas adalah adanya partisipasi dan kolaborasi antara peneliti dengan anggota kelompok sasaran.

Dengan PTK harus menunjukkan adanya perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan secara positif. Oleh karena itu, dengan diadakan tindakan tertentu harus membawa perubahan ke arah perbaikan. Apabila dengan tindakan justru membawa kelemahan, penurunan atau perubahan negatif, berarti hal tersebut menyalahi karakter PTK. Kriteria keberhasilan atas tindakan dapat berbentuk kualitatif/kuantitatif.

Penelitian PTK tidak untuk digeneralisasikan sebab hanya dilakukan di kelas tertentu dan waktu tertentu.

Disamping karakteristik tersebut, ada prinsip PTK yang perlu diperhatikan. Penelitian tindakan kelas memiliki tiga ciri pokok, yaitu 1) inkuiri reflektif, 2) kolaboratif, dan 3) reflektif.

1. *Inkuiri reflektif*. PTK berangkat dari permasalahan pembelajaran riil yang sehari-hari dihadapi oleh dosen dan mahasiswa. Jadi, kegiatan penelitian berdasarkan pada pelaksanaan tugas (*practise driven*) dan pengambilan tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi (*action driven*).

Masalah yang menjadi fokus adalah permasalahan yang spesifik dan kontekstual sehingga tidak terlalu merisaukan kerepresentatifan sampel dalam generalisasi. Tujuan penelitian tindakan kelas bukanlah untuk menemukan pengetahuan baru yang dapat diberlakukan secara luas. Tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki praktis secara langsung, di sini, dan sekarang (Raka Joni, 1998, h. 65).

Penelitian tindakan kelas menggunakan metodologi yang agak longgar, khususnya dalam kalibrasi instrumen penelitian. Namun demikian, penelitian tindakan tetap menerapkan metodologi yang taat asa (*diciplined inquiri*) dalam hal pengumpulan data yang menekankan pada objektivitas sehingga memungkinkan terselenggaranya peninjauan ulang oleh sejawat (*peer review*).

Proses dan temuan hasil penelitian tindakan kelas (PTK) didokumentasikan secara rinci dan cermat. Proses dan temuan dilakukan melalui observasi, evaluasi, dan refleksi sistematis dan

mendalam (McNiff, 1992). Penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan sebagai suatu inkuiri reflektif (*self-reflective-inquiry*).

2. *Kolaboratif*. Upaya perbaikan proses dan hasil pembelajaran tidak dapat dilakukan sendiri oleh peneliti di luar kelas (dosen), tetapi ia harus berkolaborasi dengan guru. Penelitian tindak kelas merupakan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mewujudkan perbaikan yang diinginkan.

Kolaborasi ini tidak bersifat basa-basi, tetapi harus tampil dalam keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan penelitian tindakan kelas tersebut (perencanaan, pelaksanaan, observasi evaluasi, dan refleksi), sampai dengan menyusun laporan hasil penelitian.

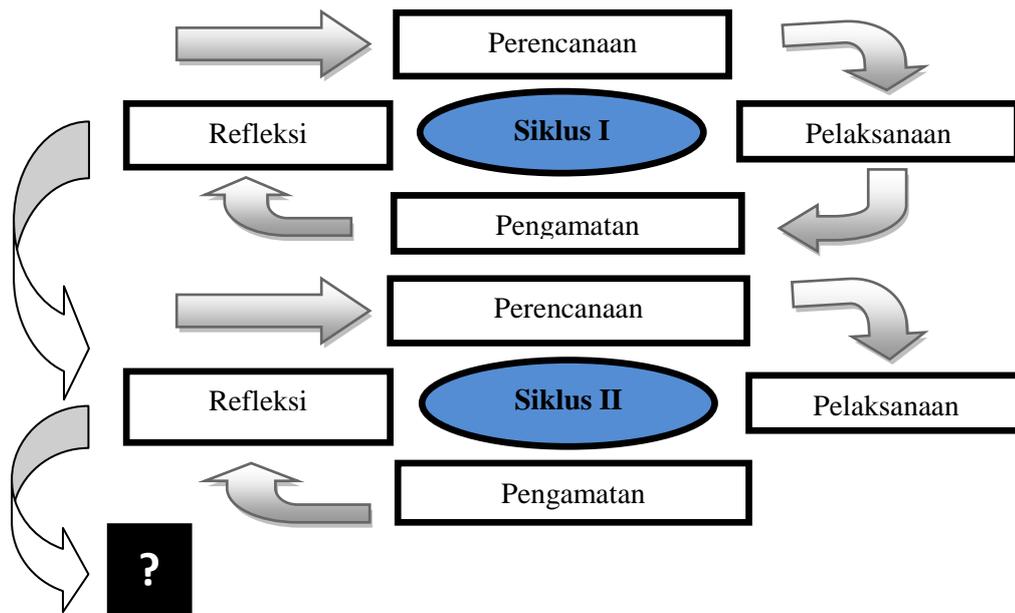
3. *Reflektif*. PTK memiliki ciri khas khusus, yaitu sikap reflektif yang berkelanjutan. Berbeda dengan pendekatan penelitian formal, yang sering mengutamakan pendekatan empiris eksperimental, penelitian tindakan kelas lebih menekankan pada proses refleksi terhadap proses dan hasil penelitian.

Penelitian tindakan kelas secara terus-menerus bertujuan untuk mendapatkan penjelasan dan justifikasi tentang kemajuan, peningkatan, kemunduran, kekurangefektifan, dan sebagainya dari pelaksanaan sebuah tindakan untuk dapat dimanfaatkan guna memperbaiki proses tindakan pada siklus kegiatan berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk PTK benar-benar berbeda dengan bentuk penelitian yang lain, baik itu

penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif maupun penelitian kualitatif. Oleh karena itu, bentuk PTK tidak perlu lagi diragukan lagi, terutama dalam upaya melaksanakan kegiatan penelitian.

d. Langkah-langkah Penelitian Tindakan Kelas



Gambar 2.1
Desain Penelitian Tindakan Kelas
Model Kemmis & Mc Taggart

Berdasarkan gambar di atas, tahapan-tahapan dalam penelitian kelas adalah sebagai berikut :

a) Perencanaan

Pada tahapan ini dilakukan pengamatan terhadap proses kegiatan belajar mengajar, mengidentifikasi masalah yang ditemukan saat belajar, menyiapkan dan menyusun instrumen penelitian berupa: silabus, RPP, media pembelajaran, lembar wawancara, dan lembar tes.

b) Pelaksanaan

Pada tahap ini merupakan tahap pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran *Problem Based Learning* berupa

pelaksanaan pembelajaran, dan pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data dari hasil kegiatan belajar, wawancara dan hasil tes. Materi pelajaran pada tahap pelaksanaan tindakan I adalah : Kasus Pelanggaran HAM, pada tindakan II materinya juga sama dengan pelaksanaan tindakan I.

c) Pengamatan

Pada tahap ini adalah proses pengumpulan data dan kemudian dianalisis untuk pengambilan hasil penelitian dan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara *non formal* dengan guru mata pelajaran PPKn SMA PGRI 1 Bandung mengenai model pembelajaran *Problem Based Learning* di kelas, serta permasalahan dan kesulitan belajar yang dialami baik oleh peserta didik ataupun guru. Kemudian peneliti mensosialisasikan model pembelajaran untuk membantu kesulitan peserta didik di kelas. Guru mitra dan peneliti sepakat untuk menggunakan model pembelajaran *Problem Based Learning* dengan langkah-langkah, silabus dan RPP yang sudah dipersiapkan oleh peneliti.

d) Refleksi

Pada tahapan ini dilakukan pengulangan kembali apa yang telah dilakukan. Mengungkapkan kembali kelemahan dan kekurangan yang terjadi pada siklus I, dan menyusun rencana pada siklus II.

e. Prinsip Penelitian Tindakan Kelas

Menurut Suharsimi Arikunto (2008, h. 33-36) prinsip-prinsip PTK yakni:

1. PTK hendaknya berkaitan dengan kegiatan nyata dalam situasi rutin.

2. PTK berawal dari adanya kesadaran diri untuk memperbaiki kinerja.
3. Pelaksanaan PTK menggunakan analisis SWOT sebagai dasar berpijak.
4. PTK dilakukan dalam bentuk upaya empiris dan sistematis.
5. Menjalankan prinsip SMART dalam perencanaan.

2. Kajian tentang Model *Problem Based Learning*

a. Pengertian Model *Problem Based Learning*

Menurut Prof. Howard Barrows dan Kelson (2009, h. 5) *Problem Based Learning* PBL adalah kurikulum dan proses pembelajaran. Dalam kurikulumnya, dirancang masalah-masalah yang menuntut mahasiswa mendapatkan pengetahuan yang penting, membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah, dan memiliki strategi belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistematis untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam karier dan kehidupan sehari-hari.

Ciri dari model ini yaitu menggunakan masalah kehidupan nyata sebagai sesuatu yang harus dipelajari peserta didik untuk melatih dan meningkatkan keterampilan berfikir kritis dan pemecahan masalah serta mendapatkan pengetahuan konsep-konsep penting, dimana tugas guru harus memfokuskan diri untuk membantu peserta didik mencapai keterampilan mengarahkan diri. Pembelajaran berbasis masalah penggunaannya di dalam tingkat berfikir yang lebih tinggi, dalam situasi berorientasi pada masalah, termasuk bagaimana belajar.

Dutch (1994) PBL merupakan metode instruksional yang menantang mahasiswa agar “belajar untuk belajar,” bekerjasama dalam kelompok untuk mencari solusi bagi masalah yang nyata. Masalah ini digunakan untuk mengaitkan rasa keingintahuan serta kemampuan analisis mahasiswa dan inisiatif atas materi pelajaran. PBL mempersiapkan mahasiswa untuk berfikir kritis, dan untuk mencari serta menggunakan sumber pembelajaran yang sesuai.

Problem Based Learning atau Pembelajaran berbasis masalah meliputi pengajuan pertanyaan atau masalah, memusatkan pada keterkaitan antar disiplin, penyelidikan autentik, kerjasama dan menghasilkan karya serta peragaan. Pembelajaran berbasis masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya pada peserta didik.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran *Problem Based Learning* adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dalam kerja tim dan dapat berfikir kritis dalam memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan masyarakat sehingga tercipta suasana yang aktif di dalam kelas.

b. Tujuan Pembelajaran *Problem Based Learning*

Ibrahim dalam Andang Heriawan dkk (2012, h. 9) mengemukakan tujuan pembelajaran berbasis masalah adalah untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berfikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual; belajar berbagai peran dengan orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi; dan menjadi pembelajaran yang otonom dan mandiri.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan model *Problem Based Learning* yaitu untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah dengan melibatkan pada pengalaman nyata sehingga peserta didik menjadi mandiri.

c. Karakteristik Model Pembelajaran *Problem Based Learning*

Model pembelajaran *Problem Based Learning* merupakan salah satu inovasi dalam proses belajar mengajar yang tentunya dapat meningkatkan cara berfikir peserta didik sehingga mempengaruhi

terhadap prestasi belajar peserta didik. Model pembelajaran tentunya terdapat karakteristik yang berbeda-beda satu sama lainnya, tentunya model pembelajaran *Problem Based Learning* memiliki karakteristik tersendiri. Berikut ini akan di jelaskan beberapa karakteristik dari dari model *Problem Based Learning* oleh beberapa ahli diantaranya sebagai berikut.

Rusmono (2012, h. 232) karakteristik pembelajaran berbasis masalah adalah:

- a. Permasalahan menjadi *starting point* dalam belajar.
- b. Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata yang tidak terstruktur.
- c. Permasalahan membutuhkan prepektif ganda (*multiple prespective*)
- d. Permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik, sikap dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar.
- e. Belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama.
- f. Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya, dan evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam PMB.
- g. Belajar adalah kolaboratif, komunikasi dan kooperatif.
- h. Pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan.
- i. Keterbukaan proses dalam PMB meliputi sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar.
- j. PMB melibatkan evaluasi dan *review* pengalaman peserta didik dan proses belajar.

Menurut Fogarty, Donald W, dkk. 1991 menyebutkan dari karakteristik-karakteristik model pembelajaran *Problem Based Learning* sebagai berikut.

- a. Belajar dimulai dengan suatu masalah.
- b. Memastikan bahwa masalah yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata siswa/mahasiswa.

- c. Mengorganisasikan pelajaran diseputar masalah, bukan diseputar disiplin ilmu.
- d. Memberikan tanggung jawab yang besar kepada pembelajar dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri.
- e. Menggunakan kelompok kecil.
- f. Menuntut pembelajar untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari dalam bentuk suatu produk atau kinerja.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik model pembelajaran *Problem Based Learning* adalah untuk menghindari terpusatnya proses belajar mengajar pada guru, proses belajar mengajar disangkutkan pada keadaan dalam dunia nyata, menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, dan mengajarkan kepada peserta didik untuk menerapkan apa yang mereka pelajari dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Adanya karakteristik *Problem Based Learning* ini sebagai pembeda dengan model-model pembelajaran yang lainnya, sehingga dengan adanya karakteristik ini maka *Problem Based Learning* merupakan model pembelajaran yang di dalam proses belajar mengajar terdapat beberapa sumber pengetahuan yang beragam, evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam *Problem Based Learning* dan guru sebagai tutor di dalam proses belajar mengajar.

d. Langkah-langkah model *Problem Based Learning*

Model pembelajaran *Problem Based Learning* merupakan diskusi kelompok kecil dengan memunculkan permasalahan. Agar lebih jelas berikut ini langkah-langkah model pembelajaran *Problem Based Learning*.

Langkah-langkah model pembelajaran berdasarkan masalah menurut Sofian Amri (2013, h. 13):

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, motivasi peserta didik terlibat aktif dan kreatif dalam aktifitas pemecahan masalah yang dipilihnya.
2. Guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut.
3. Guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dan melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan masalah.
4. Guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model yang membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya.
5. Guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan model pembelajaran *Problem Based Learning* yang pertama dilakukan adalah guru membagi kelompok dan mencari permasalahan yang akan diberikan kepada peserta didik. Kemudian guru dan peserta didik bersama-sama merumuskan masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pengalaman di dunia nyata, setelah merumuskan peserta didik mendiskusikan masalah tersebut dengan mencari solusi untuk memecahkan masalah dengan mencari informasi dan berbagai sumber. Kemudian hasil diskusi kelompok dilaporkan di kelas dan ditanggapi oleh kelompok lain.

e. Kelebihan dan Kekurangan Model *Problem Based Learning*

Setiap model pembelajaran pasti memiliki karakteristik tertentu dengan segala keunggulan dan kelemahannya. Begitu pula dengan model pembelajaran *Problem Based Learning*.

Djamarah dan Zain (2006, h. 92-93) tersedia di <http://aiasriani.wordpress.com/2014/02/14/model-problem-based-learning-sebagai-implementasi-konsep-psikologi-pendidikan-dalam-pembelajaran-anak-usia-dini-di-kelompok-b/> (12 juni 2016, jam 22:44) mengemukakan keunggulan dari model *Problem Based Learning* adalah:

- a. Metode ini dapat membuat pendidikan di sekolah menjadi lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dunia kerja.
- b. Proses belajar mengajar melalui pemecahan masalah dapat membiasakan peserta didik menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil, apabila menghadapi permasalahan di dalam kehidupan kelak.
- c. Merangsang pengembangan kemampuan berfikir peserta didik secara kreatif dan menyeluruh, karena dalam proses belajarnya, peserta didik banyak menyoroti permasalahan dari berbagai sisi dalam rangka mencari pemecahan.

Berdasarkan keunggulan *Problem Based Learning* di atas maka dapat disimpulkan bahwa *Problem Based Learning* dirancang untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berfikir kritis, keterampilan memecahkan masalah, dan keterampilan intelektualnya dalam berfikir sehingga peserta didik dapat mencari permasalahan dan cara memecahkan masalahnya.

Sedangkan kelemahan dari model *Problem Based Learning* menurut Djamarah dan Zain (2006, h. 93) adalah:

- a. Menemukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat berfikir peserta didik, tingkat sekolah dan kelasnya serta pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki peserta didik, sangat memerlukan kemampuan dan keterampilan guru.

- b. Proses belajar dengan menggunakan metode ini sering memerlukan waktu yang cukup banyak dan sering terpaksa mengambil waktu pelajaran lain.
- c. Mengubah kebiasaan peserta didik belajar dengan mendengarkan dan menerima informasi dan guru menjadi belajar dengan banyak berfikir memecahkan permasalahan sendiri atau kelompok, yang kadang-kadang memerlukan berbagai sumber belajar. Merupakan kesulitan tersendiri bagi peserta didik.

Berdasarkan pendapat tentang kelemahan dari model *Problem Based Learning* maka peneliti menyimpulkan bahwa kelemahan dari model *Problem Based Learning* terletak di kebiasaan peserta didik dalam proses belajar hanya mendengarkan dan menerima informasi dari guru saja sehingga peserta didik tidak bisa mengoptimalkan cara berfikirnya dan peserta didik hanya terpaku terhadap guru saja sebagai pemberi informasi atau materi.

3. Kajian tentang Kemampuan Belajar

a. Pengertian Kemampuan Belajar

Kemampuan adalah kepandaian melakukan sesuatu pekerjaan dengan cepat dan benar. Seseorang yang melakukan sesuatu pekerjaan dengan cepat tetapi salah tidak dapat dikatakan mampu.

Menurut Spencer dalam Hamzah Uno (2010, h. 62) mendefinisikan kemampuan sebagai “Karakteristik yang menonjol dari seseorang individu yang berhubungan dengan kinerja efektif dan superior dalam suatu pekerjaan atau situasi”. Jadi kesimpulannya

kemampuan yaitu sesuatu yang dikerjakan seseorang melalui proses dan mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa hasilnya lebih baik dari hasil sebelumnya.

b. Jenis-jenis Kemampuan Belajar

Menurut Hamalik (2008, h. 162) kemampuan dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut :

- 1) Kemampuan intrinsik adalah kemampuan yang tercakup di dalam situasi belajar dan menemui kebutuhan dan tujuan-tujuan peserta didik.
- 2) Kemampuan ekstrinsik adalah kemampuan yang hidup dalam diri peserta didik dan berguna dalam situasi belajar yang fungsional.

Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah kompetensi mendasar yang perlu dimiliki peserta didik yang memepelajari lingkup materi dalam suatu mata pelajaran pada jenjang tertentu.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Belajar

Dalam proses belajar mengajar di sekolah, guru dan orang tua selalu mengharapkan agar peserta didik dapat memperoleh hasil yang sebaik-baiknya, sesuai dengan tujuan pendidikan yang dijabarkan dalam tujuan instruksional. Namun dalam kenyataannya tidak semua peserta didik dapat mencapai hasil belajar sebagaimana yang diharapkan.

Prestasi belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi motivasi, intelegensi, bakat, minat, dan kondisi fisik. Faktor eksternal meliputi faktor sosial termasuk hubungan peserta didik dengan guru, manajemen sekolah, kurikulum pendidikan serta sarana dan fasilitas sekolah (Porwanto, 2004, h. 15).

Lingkungan sekolah yang memberi pengaruh terbesar pada kondisi peserta didik dalam proses belajar di sekolah adalah iklim di

dalam kelas (Winkel, 2005, h. 54). Lingkungan kelas mencakup lingkungan fisik kelas dan lingkungan sosial kelas. Lingkungan fisik kelas mencakup kondisi dan materi fisik seperti ruang kelas, dan ragam perlengkapan di dalam kelas (Parsons, Hinson, dan Brown, 2001, h. 123). Sedangkan lingkungan sosial kelas merupakan iklim atau atmosfer psikologi dalam kelas, dan lingkungan sosial kelas juga disebut lingkungan psikologis atau iklim lingkungan kelas (Parsons, et al., 2001, h. 78).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kemampuan belajar peserta didik yaitu lingkungan sekolah dan suasana di dalam kelas.

Sobur (2003, h. 244) mengemukakan secara garis besar, faktor-faktor yang memengaruhi / mempengaruhi belajar anak atau individu dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu:

- a. Faktor endogen atau disebut juga faktor internal, yakni semua faktor yang berada dalam diri individu.
- b. Faktor eksogen atau disebut juga faktor eksternal, yakni semua faktor yang berada di luar diri individu, misalnya orang tua atau kondisi lingkungan di sekitar individu.

Menurut Wasliman (dalam Susanto, 2013, h. 12-13) ada dua macam faktor yang mempengaruhi proses belajar yaitu:

- a. Faktor internal, yakni faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal ini meliputi: kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, serta kondisi fisik dan kesejahteraan.
- b. Faktor eksternal, yakni faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keadaan keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Keadaan ekonomi, pertengkaran antara suami istri,

perhatian orang tua yang kurang kepada anaknya, serta kebiasaan sehari-hari berperilaku yang kurang baik dari orang tua dalam kehidupan sehari-hari berpengaruh dalam hasil belajar peserta didik.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tentang faktor yang mempengaruhi belajar, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi belajar yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam diri peserta didik seperti: motivasi, kecerdasan, dan bakat. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar peserta didik seperti: keluarga, sekolah dan masyarakat.

4. Kajian Tentang Pendidikan Kewarganegaraan

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (PKN)

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu muatan wajib dalam kurikulum pendidikan, baik di tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan tinggi.

Berkaitan dengan hal itu, dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi ditegaskan bahwa:

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan paparan di atas mengenai pengertian Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang mampu melaksanakan hak dan

kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila.

Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan “citizenship”. Dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga penduduk kota atau kabupaten, karena mereka juga merupakan unit politik. Dalam otonomi, kewarganegaraan menjadi penting, karena masing-masing unit politik akan memberikan hak pemegang (biasanya sosial) yang berbeda bagi warganya.

Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan. Perbedaannya adalah hak untuk aktif dalam politik. Hal ini dimungkinkan untuk memiliki kewarganegaraan tanpa warga negara (misalnya, oleh hukum adalah subyek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik). Hal ini juga memungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota sebuah negara bangsa.

Di bawah teori kontrak sosial, status kewarganegaraan memiliki implikasi hak-hak dan kewajiban. Dalam filosofi “kewarganegaraan aktif”, seorang warga negara wajib memberikan kontribusi kemampuannya untuk memperbaiki masyarakat melalui partisipasi ekonomi, layanan publik, kerja sukarela, dan kegiatan lain yang sejenis untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakatnya. Dari pemikiran ini muncul mata pelajaran Kewarganegaraan “Civics” yang diberikan di sekolah-sekolah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelajaran PPKN memiliki 3 ciri khas yaitu, pengetahuan, keterampilan dan karakter kewarganegaraan. Ketiga hal tersebut merupakan bekal bagi siswa untuk meningkatkan kecerdasan multidimensional yang memadai untuk menjadi Warga Negara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan juga memberdayakan seseorang untuk memberi makna atau arti pentingnya sesuatu yang tidak terwujud seperti cita-cita atau konsep-konsep patriotisme, hak-hak mayoritas dan minoritas, civil society dan konstitusionalisme.

b. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2014, h.1 yaitu:

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang mempunyai misi sebagai pendidikan nilai dan moral Pancasila, kesadaran akan norma dan konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengembanagn komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan penghayatan terhadap filosofi Bhineka Tunggal Ika. Cecep Dudi Muklis Sabigin (2009, h. 4) mengatakan bahwa

Pendidikan Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.

Menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2014, h.1 yaitu:

Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah Terwujudnya warga Negara yang cerdas dan baik, yakni warga negara yang bercirikan tumbuh-tumbuhnya kepekaan,

ketanggapan, kritisasi, dan kreativitas sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara tertib, damai dan kreatif, sebagai cerminan dan pengejawantahan nilai, norma dan moral Pancasila.

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran merupakan suatu pendidikan yang dapat membentuk pribadi menjadi warga negara yang baik (*to be a good citizenship*) dan pembentuk karakter bangsa yang baik (*nation and character building*).

Menurut Branson (1999, h. 7) tujuan civic education adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik tingkat lokal, negara bagian, maupun nasional. Tujuan pembelajaran PKn dalam Depdiknas (2006, h. 49) adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut.

- 1) Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu Kewarganegaraan.
- 2) Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
- 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan PPKn yang dikemukakan oleh Djahiri (1994/1995, h. 10) adalah sebagai berikut:

- 1) Secara umum. Tujuan PPKn harus mendukung keberhasilan pencapaian Pendidikan Nasional, yaitu “Mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuann dan keterampilan, kesehatan jasmani, dan rohani, kepribadian

mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.”

- 2) Secara khusus. Tujuan PPKn yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan PPKn menekankan pada pendidikan nilai yaitu pengembangan nilai moral dan norma, membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan untuk berhubungan antara warga negara serta menjadi warga dunia. Sasaran akhir PPKn tidak hanya berorientasi pada penguasaan dan keterampilan, akan tetapi lebih ditekankan pada proses pencapaian penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dapat memberikan bekal bagi peserta didik dalam menghadapi berbagai kehidupan nyata dikemudian hari agar peserta didik dapat berperan dan mampu memposisikan diri dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

c. Ruang Lingkup Kewarganegaraan

Dasim Budimansyah dan Karim Suryadi (2008, h. 15-16) mengemukakan ruang lingkup dari pendidikan kewarganegaraan yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

- a. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan negara kesatuan republik Indonesia, partisipan dalam pembelaan negara, sikap positif

terhadap negara kesatuan republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.

- b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
- c. Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
- d. Kebutuhan warga negara meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.
- e. Konstitusi negara meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- f. Kekuasaan dan politik meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.
- g. Pancasila meliputi: kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar negara, pengalaman nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pancasila sebagai ideologi terbuka.
- h. Globalisasi meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

Adapun ruang lingkup PPKn di Sekolah Menengah Atas yang meliputi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) sebagai berikut:

- a. Hakikat Bangsa dan Negara, meliputi: hakikat bangsa, hakikat negara, unsur-unsur terbentuknya negara, asal mula negara, bentuk kenegaraan, pengertian, fungsi dan tujuan negara kesatuan republik Indonesia, semangat kebangsaan, makna nasionalisme, makna

- patriotisme, penerapan prinsip patriotisme, nasionalisme dan patriotisme diantara paham-paham lain.
- b. Sistem hukum dan peradilan nasional, meliputi: konsep tentang hukum, sistem hukum nasional, sistem peradilan nasional, kekuasaan yang merdeka, lembaga-lembaga peradilan di Indonesia, pengembangan budaya hukum, budaya (sadar) hukum, pemberantas korupsi di Indonesia, upaya dan kendala pemberantas korupsi, berperan serta dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
 - c. Hak Asasi Manusia, meliputi: pemahaman konseptual tentang HAM, pengertian HAM, macam-macam HAM, instrumen hukum HAM internasional, upaya penegakan HAM di Indonesia, berperan serta dalam penegakan HAM, dimensi internasional HAM.
 - d. Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi, meliputi: pengertian dasar negara, substansi dasar negara, fungsi dasar negara, pengertian konstitusi, kedudukan konstitusi, sifat konstitusi, fungsi konstitusi, substansi konstitusi, hubungan dasar negara dan konstitusi di Indonesia, hubungan antara dasar negara dan konstitusi di negara Liberal (Amerika Serikat), hubungan dasar negara dan konstitusi di negara komunis (Uni Soviet), isi pembukaan UUD 1945, kedudukan pembukaan UUD 1945, tanggung jawab warga negara terhadap konstitusi dan dasar negara.
 - e. Persamaan kedudukan warga negara, meliputi: pengertian warga negara, asas kewarganegaraan, pewarganegaraan, masalah

kewarganegaraan, hukum kewarganegaraan Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Indonesia, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, persamaan kedudukan warga negara, prinsip persamaan kedudukan warga negara di berbagai bidang, menghargai persamaan kedudukan warga negara.

- f. Sistem politik Indonesia, meliputi: pengertian sistem politik, struktur politik di Indonesia, suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia, macam-macam sistem politik, partisipasi dalam sistem politik di Indonesia.

5. Tinjauan tentang Penerapan Model *Problem Based Learning* untuk Meningkatkan Kemampuan Belajar Siswa PPKn Kelas X IIS 2 pada Materi Pelanggaran HAM.

a. Pengertian Penerapan

Pengertian Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

b. Pengertian Model Pembelajaran

Model merupakan suatu rancangan yang dibuat khusus dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis untuk di terapkan dalam suatu kegiatan. Selain itu juga sering disebut dengan desain yang

dirancang sedemikian rupa untuk kemudian diterapkan dan dilaksanakan.

Menurut Mill dalam Agus Suprijono (2013, h. 45) model adalah bentuk representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu. Model merupakan interpretasi terhadap hasil model observasi dan pengukuran yang diperoleh dari beberapa sistem.

c. Model Pembelajaran *Problem Based Learning*

Zainal Aqib (2013, h. 14) mengemukakan "*Problem Based Learning* yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar melalui berfikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah dalam rangka memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pelajaran".

Adapun langkah-langkah model pembelajaran berdasarkan masalah menurut Sofian Amri (2013, h. 13):

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, motivasi peserta didik terlibat aktif dan kreatif dalam aktifitas pemecahan masalah yang dipilihnya.
2. Guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut.
3. Guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dan melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan masalah.
4. Guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model yang membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya.
5. Guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan.

d. Kemampuan Belajar

Kemampuan adalah kepandaian melakukan sesuatu pekerjaan dengan cepat dan benar. Seseorang yang melakukan sesuatu pekerjaan dengan cepat tetapi salah tidak dapat dikatakan mampu.

Menurut Spencer and Spencer dalam Hamzah Uno (2010: 62) mendefinisikan kemampuan sebagai “Karakteristik yang menonjol dari seseorang individu yang berhubungan dengan kinerja efektif dan superior dalam suatu pekerjaan atau situasi”.

e. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Nurmalina dan Syaifullah (2008, h. 9) Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sarana untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Pendidikan Pancasila menitikberatkan pada moral, diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

6. Hasil Penelitian Terdahulu yang sesuai dengan Variabel Penelitian yang akan di Teliti

1. Penelitian Indra Nugraha

Indra Nugraha meneliti tentang “Penerapan Model Pembelajaran *Problem Based Learning* dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik (Penelitian tindakan kelas di SMKN 1 Gantar kabupaten

Indramayu kelas X semester I pada KD semangat kebangsaan dalam pembelajaran PKn)” penelitian ini dilaksanakan di SMKN 1 Gantar pada tahun ajaran 2012-2013.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa hasil belajar peserta didik terhadap pokok bahasan semangat kebangsaan melalui penggunaan model pembelajaran *Problem Based Learning* dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dibuktikan dengan penelitian observer pada Siklus I dan pada Siklus II. Dengan demikian disimpulkan bahwa, penggunaan model pembelajaran *Problem Based Learning* terhadap materi semangat kebangsaan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Saran dalam penelitian-penelitian adalah a) Untuk Guru sebaiknya dapat menjadi motivator yang baik di dalam kelas, terutama saat pembelajaran PPKn dengan menggunakan berbagai media dan model pembelajaran dan pemberian *reward* kepada peserta didik untuk menumbuhkan rasa percaya diri sehingga meningkatkan prestasi belajar peserta didik. b) Untuk peserta didik sebaiknya dapat berperan aktif dalam pembelajaran, karena dengan menggunakan model *Problem Based Learning* sangat memungkinkan untuk peserta didik berpartisipasi aktif dalam pembelajaran serta disusun untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan melatih cara berfikir peserta didik untuk memecahkan suatu masalah dalam proses belajar mengajar dengan begitu materi yang akan disampaikan lebih

dipahami oleh peserta didik. c) Untuk Sekolah-Sekolah sebaiknya selalu menyarankan kepada guru untuk menggunakan model pembelajaran salah satunya dengan menggunakan model *Problem Based Learning* sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan serta sebagai ide inovasi dalam mengajar. d) Untuk Penelitian Selanjutnya sebaiknya memiliki ketertarikan penggunaan model *Problem Based Learning* dapat menggali aspek yang berbeda sehingga dapat memperluas pengetahuan guru dan peneliti sebagai calon guru dalam meningkatkan kualitas mengajar serta meningkatkan kualitas belajar peserta didik karena suasana belajar jadi menyenangkan.

2. Penelitian Irna Nurainiyah

Irna Nurainiyah meneliti tentang “Penerapan model pembelajaran *problem-based learning* dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (penelitian tindakan kelas pada materi kasus pelanggaran HAM di kelas X IIS 2 SMA Negeri 12 Bandung).

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peserta didik yang menggunakan model *Problem Based Learning* dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.

3. Penelitian Dyan Nurmaya

Dyan Nurmaya meneliti tentang “Penggunaan *Problem Based Learning* dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata

pelajaran pendidikan kewarganegaraan (Di kelas X-2 SMA Negeri 3 Cikarang Utara)''.

Hasil penelitian ini adalah bahwa dengan penggunaan *Problem Based Learning* saat dan setelah tindakan dilaksanakan menunjukkan mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas X-2 SMA Negeri 3 Cikarang Utara.

B. Analisis dan Pengembangan Materi Pelajaran yang Diteliti

1. Keluasan dan Kedalaman Materi

PPKn merupakan mata pelajaran yang memiliki visi utama sebagai pendidikan demokrasi yang bersifat *multidimensional*. PPKn merupakan pendidikan nilai demokrasi, pendidikan moral, pendidikan sosial, dan masalah pendidikan politik. Namun yang paling menonjol adalah sebagai pendidikan nilai dan pendidikan moral. Oleh karena itu secara singkat PPKn dinilai sebagai mata pelajaran yang mengusung misi *pendidikan nilai dan moral*. Alasannya antara lain sebagai berikut:

1. *Materi* PPKn adalah *konsep-konsep nilai Pancasila dan UUD 45* beserta dinamika perwujudan dalam kehidupan masyarakat negara Indonesia.
2. *Sasaran belajar akhir* PPKn adalah perwujudan nilai-nilai tersebut dalam *perilaku nyata* kehidupan sehari-hari.
3. Proses pembelajarannya menuntut terlibatnya emosional, intelektual, dan sosial dari peserta didik dan guru sehingga nilai-nilai itu *bukan hanya dipahami* (bersifat kognitif) tetapi *dihayati* (bersifat afektif) dan *dilaksanakan* (bersifat perilaku).

Oleh karena itu bagi pendidikan di Indonesia PPKn merupakan pembelajaran nilai, moral Pancasila dan UUD 45 yang bermuara pada terbentuknya watak Pancasila dan UUD 45 dalam diri peserta didik. Watak ini pembentukannya harus dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi keterpaduan konsep moral, sikap moral dan perilaku moral Pancasila dan UUD 45 (kemendikbud).

1. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM. (Permendiknas N0. 22 tahun 2006 Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk pendidikan dasar dan menengah). Dari pernyataan diatas dapat di simpulkan bahwa Hak Asasi Manusia sangat di perlukan dan sangat di hormati oleh setiap manusia. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Banyak sekali yang sudah kita lihat bentuk-bentuk Planggaran Ham yang merajalela di sekitar lingkungan tempat kita tinggal, salah satu Contoh Kasus nya di Indonesia yaitu kasus Yuyun Siswi SMP yang di perkosa dan di bunuh oleh 14 pemuda tangguh.

Akibat dari peristiwa ini, memicu tindakan kekerasan dalam kehidupan bermasyarakat dan membuat panik seluruh warga Indonesia”.

2. Karakteristik Materi

Menurut John Locke seorang ahli ilmu Negara dalam buku *Sistem Pemerintahan Indonesia* (2012, h. 34) karangan Trubus Rahardiansyah menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Selain John Locke, ada lagi tokoh nasional yang memberikan batasan tentang hak asasi manusia. Beliau adalah Prof. Mr. Koentjoro Poerbapranoto, dalam buku *Sistem Pemerintahan Indonesia* (2012) karangan Trubus Rahardiansyah yang menjelaskan hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.

Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari dua para ahli diatas adalah Hak asasi manusia yaitu hak dasar atau hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia di lahirkan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 menyebutkan bahwa “*Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*”. Dengan demikian, untuk menjaga kehormatan dan melindungi HAM yaitu menjaga keselamatan manusia

dengan seimbang antara hak dan kewajiban. Banyak sekali contoh yang bisa kita lihat di televisi akibat dari ketidak seimbangannya antara hak dan kewajiban maka timbullah pelanggaran HAM yang merugikan orang lain dan menyakiti orang lain misalnya pembunuhan, penipuan, pemalsuan dan banyak lagi yang terjadi di lingkungan sekitar kita yang dapat kita lihat dengan mata kepala kita sendiri.

Dasar Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia yaitu:

1. UUD 1945

Tercantum dalam pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1.

2. Tap MPR

Tercantum dalam TAP MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998.

3. UU

Tercantum dalam UU no 39 tahun 1999 tentang HAM.

4. Perda

Tercantum dalam pasal 5 UU No.10/2004 *jo* Pasal 138 UU No.32/2004, menentukan materi Perda harus memperhatikan asas materi muatan PUU antara lain asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, dan yang terpenting ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) UU No.10/2004 *jo* Pasal 136 ayat (4) UU No.32/2004 bahwa materi Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan /atau peraturan PUU yang lebih tinggi. Dalam penjelasan Pasal 136 ayat (4) UU No.32/2004 dijelaskan bahwa "bertentangan dengan kepentingan umum" adalah

kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

5. Kepres

Tercantum dalam nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

3. Bahan dan Media

Bahan dan media yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber Pembelajaran

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2015) PPKn SMA dan Latihan Kerja peserta didik.
- b. UUD 1945

2. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Komputer, Infokus, Papan tulis dan Spidol.

3. Media dan Gambar / Video tentang Kasus Pelanggaran HAM

4. Strategi Pembelajaran

- a. Pendekatan : Scientific
- b. Model Pembelajaran : *Problem Based Learning* (PBL)
- c. Metode : Diskusi, tanya jawab, dan presentasi

5. Sistem Evaluasi

- a. Tes tertulis berbentuk uraian
- b. Penugasan